

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA IJIN POLIGAMI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA Bpp.)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**AGIL FITRA MUHSHY PARADANA HARTAMA**

**C.100.110.064**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

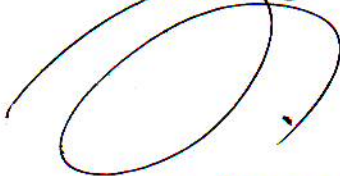
Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Februari 2016

Pembimbing I



(Darsono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Mutimatun N'ami, S.H., M.Hum.)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA IJIN POLIGAMI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA Bpp.)**

Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama  
C.100.110.064  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[agil.fitra@yahoo.co.id](mailto:agil.fitra@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim dan menurut Hukum Islam dalam izin berpoligami dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal-normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum Islam dalam izin berpoligami mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, 23, 127, 129, dan As-Sunnah, serta para mazhab dan ulama tafsir Al-Qur'an serta hukum positif di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 55, 56, 57, 58, 59 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 4, 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42, 43, 44, 45. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara izin poligami, yakni hakim telah memutus perkara dengan menggunakan dasar Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak poligami dan Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) sebagaimana Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

***Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan perkara, ijin poligami***

**ABSTRACT**

The purpose of this study to determine the application of legislation by judges and according to Islamic law in the permit polygamy and to determine the legal considerations the judge in determining the verdict No.1187 / Pdt.G / 2013 / PA BPP. The research method uses doctrinal-normative approach. Source of data derived from secondary data of primary and secondary sources of law. Data were collected by library study and then the data were analyzed by qualitative analysis. The results showed that the application of laws and regulations and in accordance with the Islamic law permits polygamy refers to the Qur'an Surat An-Nisa ', paragraph 3, 23, 127, 129, and Sunnah, as well as schools and scholars of tafsir Al- Qur'an as well as the positive law in Indonesia refers to the compilation of Islamic law which is in Article 55, 56, 57, 58, 59, paragraph (2), Law No. 1 of 1974 on Marriage, namely in Article 4, paragraph 5 (2), Government Regulation No. 9 of 1975 Article 42, 43, 44, 45. Legal considerations Surakarta Religious Court judges in deciding the case the permission for polygamy, which the judge has to decide the case using the basic Applicant concerned will conduct prohibited by religious norms if the Petitioner is not polygamy Petitioner and Respondent as his wife had been approved and would not mind Applicant married again (polygamy) as Al-Qur'an Surat an-Nisa verse 3.

***Keywords: consideration of the judge, the verdict of the case, permits polygamy***

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologi yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.<sup>1</sup> Selanjutnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan keluarga keluarga yang bahagia dan kekal itu, harus lah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila.<sup>2</sup>

Akibat dari suatu perkawinan terbentuklah suatu perkawinan yakni dalam hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hokum perdata yang mengatur dan melindungi hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. Hal 3.

<sup>2</sup> *Ibid*; hal.4

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia. Hal 1.

Memperbolehkan poligami adalah suatu tindakan yang berarti meletakkan suatu hambatan di hadapan wanita, di tengah-tengah perjalanan menuju kemajuan masyarakat. Sebaliknya, melarang poligami berarti menghilangkan sebahagian dari rintangan-rintangan yang memperlambat pergerakan wanita, dan merampas hak-haknya serta merendahkan kedudukannya.<sup>4</sup> Poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita, untuk meningkat dari suasana kehidupan yang diliputi oleh kegelisahan, kehinaan dan terlantar, menuju kehidupan berkeluarga yang mulia, dan keibuan yang mulia di mana wanita merasakan kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya. Poligami juga merupakan salah satu penerapan dari kebebasan wanita, dan terlaksananya apa yang dikendakinya, karena sebenarnya laki-laki itu tidak berpoligami tanpa kemauan wanita.<sup>5</sup>

Mengutip dari kesimpulan di atas poligami zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah, karena poligami zaman Rasulullah lebih mempunyai niat dimana mempunyai keinginan atau maksud ingin membantu kaum wanita yang kurang mampu dari segi ekonomi, janda yang ditinggal oleh suaminya yang kemudian masih mempunyai anak dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan zaman sekarang lebih mengikuti nafsu. Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Abdul Nasir Taufiq Al-'Atthar, 1976, *Poligami di Tinjau dari segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang. Hal 11.

<sup>5</sup> *Ibid*; Hal. 12

Surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W:

*Dari 'Aisyah r.a. bahwasanya ada seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahnya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon korma yang berbuah. Laki-laki ini menahannya (tidak mau menceraikannya, dan tidak senang jika dinikahi orang lain, sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatupun dari laki-laki itu, maka turunlah ayat Q.S.An-Nisa ayat 3 (H.R Imam Bukhari dan Muslim).*

Pembolehan kawin lebih dari satu orang adalah merupakan suatu pengecualian. Di samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.<sup>6</sup> Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi pengarahannya pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan

---

<sup>6</sup>Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta*. Hal 74-75.

bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya seperti berikut: (a) Harus ada ijin dari Pengadilan, (b) Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan, (c) Hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.<sup>7</sup>

Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal-normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Serta Menurut Hukum Islam Dalam Izin Berpoligami**

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Begitu juga mengenai Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 77

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.



Dasar hukum poligami dalam Islam ialah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yakni: Surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Sedangkan menurut hadits Al-Bukhari meriwayatkan:<sup>8</sup>

*Dari Aisyah, sesungguhnya seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahinya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah. Laki-laki itu menahannya sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki itu, maka turunlah ayat ini: wa in khiftum allaa tuqsithuu (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.) Aku mengira ia mengatakan, Ia bersekutu dalam pohon kurma dan hartanya.”*

Sejak masa Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi'in, periode ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat *Akhkam* itu sebagai berikut:

*Pertama*, perintah Allah SWT, “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.

*Kedua*, larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat*”. Menurut Al Qurtubi, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam Al-Qur'an dan retorika bahasa Arab.

---

<sup>8</sup> Abdullah, 2003, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i., Hal. 231-232

*Ketiga*, poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. (Q.S. An-nisa`: 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.

*Keempat*, sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzalim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

*Kelima*, sebagian ulama` penganut Madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi`i terhadap teks Al-Qur`an, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dalam kitab *akhkam al-qur`an*, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat *diyanah* (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Fada Abdul Razak Al-Qoshir, 2004, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, hal. 42-45.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan**

Berdasarkan pada analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan Izin Poligami yaitu dalam perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Terdapat beberapa kesenjangan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Balikpapan terhadap putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini serta majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak menempuh acara mediasi dengan menunjuk Sdri Dra. Juraidah sebagai mediatornya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi telah ternyata upaya-upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan permohonan Pemohon diketahui bahwa alasan Pemohon memohon izin untuk dapat menikah lagi adalah karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, dan alasan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi oleh karena Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami), maka untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh norma agama, maka untuk kemaslahatan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang memohon izin dapat menikah lagi sepatutnya untuk dapat dikabulkan.

Pertimbangan majelis hakim tersebut telah sesuai ketentuan/dalil dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Hadist Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam Kitab Al-Hasyiah Al-Bajuri juz III halaman 366: "Apabila seorang suami/laki-laki beristri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi saw seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada istri-istrinya".

Menurut penulis, pertimbangan hakim di atas dalam memberikan pertimbangan putusannya terjadi kejanggalan dalam memutus perkara ini, yakni kejanggalan pertimbangannya adalah permohonan Pemohon diketahui alasan Pemohon memohon izin untuk dapat menikah lagi adalah karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Alasan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi oleh karena Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) maka untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh norma agama maka untuk kemaslahatan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang memohon izin dapat menikah lagi sepatutnya untuk dapat dikabulkan.

Kejanggalan-kejanggalan pertimbangan Hakim yang di baca oleh penulis sehingga penulis memberikan pendapat terhadap pertimbangannya yaitu, bahwa hakim menerima izin poligami terhadap Pemohon tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis alasan tersebut yang kurang rasional yaitu Pemohon ditakutkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama, di mana alasan pemohon tersebut teranggap sama dengan halnya sebuah pengancaman terhadap hakim dalam mendapatkan izin poligami. Karena alasan tersebut seharusnya tidak digunakan oleh seseorang yang beragama Islam dan untuk berpoligami sudah jelas semua alasannya beserta peraturan yang telah diberlakukan sebagaimana

juga sejarah terjadinya poligami atau kenapa Rasulullah berpoligami atas dasar apa Rasulullah berpoligami, semuanya telah di jelaskan di risalah nabi Al-Quran dan Hadistnya.

Pertimbangan selanjutnya yang menjadi kejanggalan-kejanggalan menurut penulis terhadap pertimbangan Hakim yang memutus dalam perkara tersebut. Justru sudah jelas tidak sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, dan menjadi alasan kecil hakim mengabulkan Pemohon dalam melakukan poligami yakni mendapat persetujuan dari pihak istri pertama. Padahal setuju dalam hal seorang suami berpoligami yaitu seorang istri harus setuju secara lahiriah dan batiniah, apalagi melihat kondisi perkembangan zaman sekarang jelas tidak menoleh kebenaran sama sekali seorang istri mengizinkan seorang suami untuk melakukan poligami. Jika seorang istri setuju secara batiniah, maka sejak awal sebelum ada perkara tersebut dalam izin poligami yang diajukan Pemohon, sudah pasti ada alasan-alasan yang terselip di permohonan tersebut misalnya seorang istri memang menyuruh suaminya untuk melakukan poligami dengan alasan-alasan yang terucap atau terlampir oleh seorang istri. Pada fakta di dalam rumahtangganya, kita dan para Hakim juga tidak mengetahui ada alasan-alasan seorang istri memaksakan dirinya untuk memberikan izin poligami terhadap suaminya.

Kejanggalan pertimbangan hakim yang selanjutnya, yaitu dasar Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, di mana hakim tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan semudah membalikkan telapak tangan, karena seorang Hakim harus mengetahui sejarah turunnya ayat tersebut dan risalah Rasulullah

melakukan poligami disertai dengan ahli tafsir yang telah sah kebenarannya. Misalnya Ibnu Katsir yaitu menjelaskan tentang Poligami. Apabila di bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena mereka cukup banyak, dan Allah tidak akan memberikan kesempitan padanya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, penerapan peraturan perundang-undangan serta Menurut Hukum Islam dalam izin berpoligami yaitu, pada instansi Peradilan Agama penerapan suatu peraturan yang berlaku mengenai izin poligami terhadap seorang suami, ialah mengacu pada Al-Qur'an An-Nisa': An-Nisa': ayat 3, 23, 127, 129, dan As-Sunnah, serta para mazhab dan ulama tafsir Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 55, 56, 57, 58, 59 ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 4, 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42, 43, 44, 45.

*Kedua*, pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam Memutus Perkara Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA. Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan) yaitu, seharusnya hakim lebih teliti, cermat dan tepat dalam membuat pertimbangan dalam perkara ini. Hakim telah memutus dengan menggunakan dasar Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami dan Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui dan

tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) serta Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

### **Saran**

*Pertama*, bagi Pengadilan Agama Balikpapan, hendaknya penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara profesional terhadap orang Islam yang mengajukan izin poligami.

*Kedua*, bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.

*Ketiga*, bagi para hakim hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan di dalam menegakkan hukum bisa dengan memperhatikan hukum atau peraturan yang hidup di masyarakat sebagai bahan ijtihad dan lebih menekankan beratnya tanggung jawab dari Pemohon terhadap istri-istri dan anak-anaknya kepada Pemohon sendiri atau orang lain yang akan mengajukan izinkan poligami.

*Keempat*, bagi Termohon atau para istri-istri, hendaknya memikirkan dahulu dengan baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukm dalam menjalani poligami sangat berat.

*Kelima*, bagi Pemohon atau orang-orang yang hendak beristri lebih dari satu, hendaknya mempelajari dahulu syarat-syarat serta akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita secara Islami dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdullah. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-'Atthar, Abdul Nasir Taufiq. 1976. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qoshir, Fada Abdul Razak. 2004. *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, hal. 42-45.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung ; Pustaka Setia.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. 1987. *Aazas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penterjemah Depag RI, 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Fokus Media.

### **Aturan Perundang-undangan**

- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama